

ABSTRAK

EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI DI TELUK LAMPUNG

(Studi Dampak Sosial-Ekonomi Nelayan Kelurahan Sukaraja Pada Kasus Reklamasi Pantai Di Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung)

Oleh

FITRI WAHYUNI

Kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung yang cukup luas menimbulkan beberapa permasalahan atau ketidak sesuaian ditinjau dari kondisi sosial-ekonomi nelayan disekitar wilayah reklamasi. Setelah kebijakan reklamasi pantai dilaksanakan ternyata memberi dampak pada nelayan sekitar menjadi kesulitan dalam mencari ikan dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga didapatkan rumusan masalah bagaimana dampak sosial-ekonomi yang dirasakan nelayan akibat kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung, khususnya di Kelurahan Sukaraja. Tujuan dalam penelitian ini adalah memberi gambaran dan menganalisis dampak sosial ekonomi yang dirasakan nelayan sebagai dampak yang timbul dari kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan reklamasi pantai. Dalam mengevaluasi dampak dari kebijakan ini, peneliti menggunakan teori evaluasi dampak atau evaluasi sumatif dengan metode evaluasi milik Rossi and Freeman, kemudian menggunakan Undang-Undang dan beberapa teori penunjang lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan reklamasi pantai belum menghasilkan dampak yang diinginkan. Hal ini disebabkan beberapa faktor. (1) Masalah publik terkait kurangnya lahan di Kota Bandar Lampung belum dapat diselesaikan, (2) Tidak adanya partisipasi atau keikutsertaan masyarakat pesisir, (3) Cara pengimplementasian yang tidak tepat, (4) Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, (5) Belum adanya penanganan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait dampak yang diterima masyarakat pesisir, (6) Timbulnya *mindset* masyarakat pesisir yang merasa dirugikan dan hanya menguntungkan pihak pengembang. Selain itu, kebijakan reklamasi pantai menghasilkan dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan di Kelurahan Sukaraja. Sehingga Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan, pengawasan dan koordinasi untuk menangani dampak serta mengikut sertakan masyarakat dalam proses kebijakan reklamasi pantai.

Kata Kunci : Kebijakan, Evaluasi, Reklamasi Pantai, Dampak.

ABSTRACT

IMPACT EVALUATION OF THE POLICY COASTAL RECLAMATION IN TELUK LAMPUNG

(Study Of Socio-Economic Impacts Of Fishermen On Kelurahan Sukaraja in Case
Of Coastal Reclamation on Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras,
The City Of Bandar Lampung)

By

FITRI WAHYUNI

The policy of coastal reclamation in the Teluk Lampung ample poses some problems or lack of socio-economic conditions of rendering of fishermen around the area of reclamation. After the policy of coastal reclamation implemented, have are gave an impact on the fishermen about being the difficulty in finding fish and meet his needs. So the formula obtained by the issue of how socio-economic impacts of fishing due to the perceived policy of coastal reclamation in the Teluk Lampung, especially Kelurahan Sukaraja. The purpose of this research is to give an overview of the impact of the social economy is perceived as one of the fishermen the impact arising from the existence of a policy of coastal reclamation in the Teluk Lampung. This research was conducted to evaluate the impact of coastal reclamation policy. In evaluating the impact of this policy, researchers used the theory of impact evaluations or evaluation summative evaluation methods belonged to Rossi and Freeman, then use the law and some other supporting theory. Type of this research is descriptive research with qualitative approach.

Conclusion of this research is the policy of coastal reclamation have yet to produce the desired impact. This is due to several factors. (1) Problems related to lack of public land in the town of Bandar Lampung has yet to be resolved, (2) the lack of participation or the participation of coastal communities, (3) how implementation is not appropriate, (4) the Government of the city of Bandar Lampung that have yet to implement environmentally development, (5) Yet the existence of the handling of the Government of the city of Bandar Lampung accepted impact-related coastal communities, (6) the incidence of coastal communities must feel aggrieved and only benefit the developer. In addition, the policy of reclaiming the beaches generate unwanted impacts for coastal communities in particular Kelurahan Sukaraja fisherman. So the Government of the city of Bandar Lampung need to apply environmentally development, oversight and coordination to deal with the impact of requiring community as well as in the process of coastal reclamation policy.

Keywords: Policy, Evaluation, Coastal Reclamation, Impact.